

**PERAN PENJAMINAN KREDIT TERHADAP USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) PADA PERUSAHAAN
UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA (PERUM JAMKRINDO)
CABANG PEKANBARU**

LAPORAN AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Studi Pada Program Diploma Tiga (D.III) Perbankan Syariah
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)**



Oleh :

SUGIANTO

0072 6000 327

**PROGRAM DIPLOMA TIGA (D.III)
PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Laporan akhir ini berjudul “Peran Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Pekanbaru.”

Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Penjaminan Kredit terhadap UMKMK pada Perum Jamkrindo cabang Pekanbaru. Bagaimana Mekanisme Penjaminan Kredit bagi UMKMK pada Perum Jamkrindo cabang Pekanbaru. Faktor apa saja yang mempengaruhi Penjaminan Kredit terhadap UMKMK.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada Perum Jamkrindo cabang Pekanbaru. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak Perum Jamkrindo cabang Pekanbaru. Dan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumen

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Penjaminan Kredit terhadap UMKMK pada Perum Jamkrindo cabang Pekanbaru. Untuk mengetahui Mekanisme Penjaminan Kredit UMKMK pada Perum Jamkrindo cabang Pekanbaru. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penjaminan Kredit terhadap UMKMK.

Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa dapat diketahui bahwa Peran Penjaminan Kredit terhadap UMKMK sangat besar demi terciptanya perkembangan sektor riil, karena bagaimanapun usaha yang produktif harus didukung dengan modal yang cukup dari perbankan, berikut ini adalah hasil penelitian yang diperoleh:

1. Peran Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sangat besar demi terciptanya perkembangan sektor riil, karena bagaimanapun usaha yang produktif harus didukung dengan modal yang cukup dari Perbankan.
2. Realisasi penjaminan kredit bagi UMKMK pada Perum jamkrindo cabang Pekanbaru mengacu pada peraturan dan undang-undang kerja sama atau kesepahaman (MoU) yang berlaku dengan Bank. Nasabah yang ingin melakukan penjaminan kredit dapat mengajukan kepada bank yang bekerja sama dengan perum jamkrindo. melalui mekanisme tertentu dan berpatokan pada perjanjian kerjasama yang berlaku.
3. Faktor yang sangat mempengaruhi penjaminan kredit ialah ketentuan-ketentuan pemerintah dalam pelaksanaan kredit UMKMK yang berkaitan dengan suku bunga, jangka waktu, dan lainnya yang direalisasikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	v
Daftar Isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Hipotesis	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA (PERUM JAMKRINDO) CABANG PEKANBARU

A. Sejarah singkat Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)	13
B. Struktur Organisasi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Pekanbaru	16
C. Tujuan, Visi dan Misi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)	21

D. Produk-Produk Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).	23
---	----

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENJAMINAN KREDIT DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK)

A. Kredit.....	28
B. Penjaminan Kredit dan Strategi Pemasarannya	30
C. Usaha Mikro	31
D. Usaha Kecil	34
E. Usaha Menengah.....	37
F. Koperasi	39

BAB IV PERAN PENJAMINAN KREDIT TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK)

A. Peran Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	46
B. Mekanisme Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	49
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi(UMKMK)	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....57

B. saran.....58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya relatif belum stabil dan masih membutuhkan berbagai fasilitas dan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya, khususnya pada ekonomi kecil atau saat ini dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM). Pemerintah dalam hal ini sangat tanggap, ini dibuktikan dengan diresmikannya lembaga keuangan di berbagai daerah baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, Bank Nasional maupun Bank Swasta, baik konvensional maupun syariah dan lain sebagainya. Serta lembaga keuangan nonbank lainnya seperti Pegadaian, Penjaminan Kredit, Asuransi, Permodalan dan masih banyak yang lain begitu pula yang akan muncul di kemudian hari.

Dalam perekonomian modern, Bank atau lembaga keuangan lainnya memegang peranan yang sangat penting. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah menghimpun dana masyarakat (*funding*) lalu disalurkan (*lending*) pada sektor produktif yang bertujuan untuk menggairahkan industri kecil dan besar yang sudah berjalan maupun industri yang baru berkembang melalui jasa-jasa Bank (*services*)¹. Dana yang masyarakat titipkan ke Bank akan sangat membantu Bank dalam melaksanakan kegiatan penyaluran kembali kepada

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2004), cetakan ke-4, h. 6

nasabah-nasabah terutama untuk kegiatan produktif seperti pada sektor riil atau sekarang dikenal dengan UMKMK.

Peranan Bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan sudah banyak, maka menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet.²

Untuk mencapai keberhasilan usahanya, sebagian besar masyarakat yang memiliki usaha produktif memilih melakukan peminjaman dana atau kredit kepada Bank sebagai modal usaha dengan syarat dan prosedur yang berlaku, dan tentunya dengan jaminan barang berharga atau agunan sebagai syarat utamanya. Kemudian dana yang dicairkan oleh Bank digunakannya untuk kelangsungan usahanya hingga mencukupi kebutuhannya. Menurut UU RI No. Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I, Pasal I, Ayat 12 : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank.³

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cetakan ke-2, h. 71

³ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), cetakan pertama, h. 87

Namun, lain halnya dengan sebagian masyarakat yang mempunyai usaha yang produktif lalu membutuhkan modal untuk terus berkembang dan ingin melakukan peminjaman dana ke Bank, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, khususnya pemenuhan agunan atau disebut dengan non bankable. Jika manusia mau berusaha maka ada saja jalan untuk menuju kebaikan, itu dikarenakan Allah SWT selalu menunjukkan kasih sayangNya kepada hambahambanya.

Masih ada cara bagi orang yang mau berusaha untuk berkembang dan melakukan usaha yang halal. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) yang mempunyai kegiatan usaha utama untuk melakukan penjaminan kredit/pembiayaan, baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat a Bagian Ketiga tentang “Kegiatan dan Pengembangan Usaha.”⁴ Ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kecil yang produktif, asalkan masyarakat mau dan tidak malas untuk mengurus administrasinya dan memenuhi prosedur-prosedur perusahaan tersebut.

Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan PP No. 41 Tahun 2008 untuk menggantikan dan melanjutkan tugas dan wewenang Perum Sarana Pengembangan Usaha (PP No. 95 Tahun

⁴ Dokumen Perum Jamkrindo Tahun 2009

2000).⁵ Perusahaan ini mempunyai jaringan luas terutama pada perbankan yang diawali dengan adanya kerjasama yang telah disepakati antara kedua lembaga. Jadi hubungan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dengan lembaga keuangan yang lain harus diawali dengan adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) / Perjanjian Kerja Sama agar tidak terjadi kesalahan dan lain sebagainya.

Penjaminan Kredit adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada UMKMK yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama pada pemenuhan agunan atau disebut tidak Bankable. Penjaminan Kredit merupakan kerjasama antara tiga pihak, yaitu Perum Jamkrindo, Penerima Jaminan (Perbankan/Kreditur) dan Terjamin (nasabah UMKMK). Selanjutnya Penjamin Kredit (Perum Jamkrindo) akan mengambilalih sementara risiko pelunasan kredit Terjamin (nasabah UMKMK) kepada Penerima Jaminan (Perbankan / Kreditur) apabila pada waktu yang diperjanjikan terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan adanya Perum Jamkrindo, Perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.⁶

Pada umumnya BUMN seperti Perum Jamkrindo ini adalah bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Karena perusahaan

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

ini milik Negara, maka tujuan utamanya adalah untuk membangun ekonomi sosial menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.⁷ Ciri-ciri utama dari BUMN ialah ⁸:

1. Tujuan utama usaha ialah melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan.
2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang.
3. Pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital.
4. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta bebas bergerak untuk mengikat suatu perjanjian, kontrak, serta hubungan-hubungan dengan pihak lain.
5. Dapat dituntut dan menuntut, sesuai dengan ayat dan pasal dalam hukum perdata.
6. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara serta dapat memperoleh dana dari pinjaman dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi.
7. Pada prinsipnya secara financial harus dapat berdiri sendiri.
8. Setiap tahun perusahaan menyusun laporan tahunan yang memuat neraca dan laporan rugi laba untuk disampaikan kepada yang berkepentingan.

⁷ M. Fuad, DKK, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), cetakan ke-2, h. 68

⁸ M. Fuad, DKK, *op. cit.*, h. 69

Badan usaha ini diharapkan dapat membantu perekonomian sosial masyarakat dan mampu memberikan akses keuangan bagi UMKMK. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dengan baik, dengan mengikuti prosedur dan menaati peraturan yang berlaku agar pelaksanaannya dapat mencapai target yang diharapkan pemerintah. Namun, jika masih ada ketidaksadaran sebagian masyarakat yang melalaikan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada pihak kreditur, ini sangat merugikan pihak lain yang ikut bekerjasama, dalam hal ini ialah pihak Perbankan dan Perusahaan BUMN. Adapun beberapa hal yang menjadi masalah dalam proses pengaksesan kredit ini antara lain:

1. Kemungkinan terjadinya kredit macet yang disebabkan kelalaian nasabah UMKMK dalam membayar angsuran kepada Penerima Jaminan (Bank).
2. Kelambatan penyelesaian administrasi klaim jika macet, meninggal dunia maupun PHK. Seperti keterlambatan penyampaian berkas klaim kepada Perum Jamkrindo.
3. Nasabah UMKMK yang tidak konsisten dalam menjalankan kerjasama ini dan menganggap pihak Penjamin dan Penerima Jaminan akan menyelesaikan masalah dengan mudah jika terjadi kelalaian.

Sehubungan dengan hal di atas penulis sangat tertarik untuk membahas tentang hubungan kerjasama antara Perum Jamkrindo, Perbankan/Kreditur dan Nasabah UMKMK dengan judul **“PERAN PENJAMINAN KREDIT TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI**

**(UMKMK) PADA PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT
INDONESIA (PERUM JAMKRINDO) CABANG PEKANBARU.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Peran Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana mekanisme Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Pekanbaru?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun maksud dan tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai upaya penerapan teori-teori yang penulis selama mengikuti perkuliahan pada UIN SUSKA RIAU.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

- b. Untuk mengetahui Mekanisme dan Prosedur Penjaminan Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Ahlimadya pada Program Diploma Tiga (D.III) Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat pada perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasikannya ke dalam penelitian. Serta menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dalam menambah khazanah kepustakaan.
- c. Memberikan informasi kepada khalayak tentang peran Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Pekanbaru.

D. Hipotesis

Berdasarkan argumen yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diketahui hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa Peran Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sangat besar demi terciptanya perkembangan sektor riil, karena bagaimanapun usaha yang produktif harus

didukung dengan modal yang cukup dari Perbankan. Dengan adanya Penjaminan Kredit dari Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) yang melalui pihak Perbankan/Kreditur dengan mekanisme yang ditentukan dan memberikan keringanan bagi nasabah maka kebutuhan dan kelangsungan UMKMK dapat terpenuhi dan bisa berkembang hingga mencapai tujuan yang diinginkan pengusaha kecil tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan usaha yang awalnya hanya kecil-kecilan lalu menjadi usaha yang meraih omset jutaan rupiah bahkan milyaran rupiah.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) Cabang Pekanbaru Jl. Sudirman, Komp. Perkantoran Sudirman Raya, Blok D9, Simpang Tiga, Pekanbaru.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah pihak pimpinan dan karyawan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Pekanbaru.
- b. Obyek penelitian ini adalah Peran Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah adalah pimpinan serta karyawan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Pekanbaru sebanyak 25 orang. Namun, yang dijadikan sampel hanya 5 orang karyawan dengan teknik Purposive Sampling.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, ialah suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, ialah suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis kepada karyawan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Pekanbaru.
- c. Studi Dokumen, ialah mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan melalui kata-kata.

7. Metode Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau gagasan-gagasan yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

Bab I Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pada Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum pada perusahaan yang mencakup sejarah singkat berdirinya perusahaan dan

perkembangannya, struktur organisasi, visi dan misi, serta produk-produk dan ruang lingkup kegiatan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) cabang Pekanbaru.

- Bab III Tinjauan umum tentang Kredit, Penjaminan Kredit dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), isi bab ini terdiri dari pengertian Kredit, Penjaminan Kredit, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
- Bab IV Peran penjaminan kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) Cabang Pekanbaru, isi bab ini merupakan hasil penelitian yang berkesesuaian dengan judul, mekanisme Penjaminan Kredit dan faktor yang mempengaruhi Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
- Bab V Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi masyarakat, Perbankan maupun Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) Cabang Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT

INDONESIA (PERUM JAMKRINDO) CABANG PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibanding dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN & Swasta), Pemerintah pada tahun 1970 membentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Lembaga ini bertujuan untuk membantu mengembangkan usaha koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit sehingga koperasi dapat memenuhi syarat agunan (*collateral*) perbankan dalam rangka penyaluran kredit modal usaha koperasi

Dalam perjalanannya, fungsi LJKK menjadi sangat penting dalam pengembangan usaha koperasi secara keseluruhan, sehingga memerlukan manajemen pengelolaan aktivitas usaha sebagaimana umumnya sebuah badan usaha. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi atau disingkat dengan Perum PKK melalui PP Nomor 51 Tahun 1981, yang sekaligus meleburkan LJKK ke dalamnya. Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan tugas Perum PKK sebagai

perusahaan penjaminan kredit, Pemerintah menyempurnakan PP Nomor 51 Tahun 1981 dengan PP Nomor 27 Tahun 1985.¹

Berjalannya waktu dan terkait keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan sekaligus mengganti nama perusahaan menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha melalui PP Nomor 95 Tahun 2000 kemudian dengan PP Nomor 41/2008 berganti lagi menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau yang disingkat dengan Perum Jamkrindo.²

Sejalan dengan semakin besarnya ekspansi pembiayaan syariah, manajemen memandang perlu untuk membentuk Divisi Penjaminan Syariah. Pada bulan September 2006, melalui surat nomor U-17/DSN-MUI/IX/2006 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan rekomendasi pendirian Divisi Penjaminan Syariah Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Rekomendasi DSN-MUI tersebut semakin memantapkan langkah Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dalam bekerjasama dengan Perbankan Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya

¹*Dokumen Perum Jamkrindo Tahun 2009*

² *Ibid*

Saat ini, sebagai perusahaan penjamin, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia telah melakukan penjaminan dengan nilai penjaminan cukup signifikan. Namun, kapasitas Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia sangat terbatas, karena relatif kecilnya ekuitas. Mengingat adanya keterbatasan kapasitas namun peran perusahaan penjaminan dalam rangka pemberdayaan UMKMK relatif besar, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKMK dengan memperkuat modal dan perluasan jangkauan pelayanan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Kebijakan tersebut dimuat dalam Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK. Sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut, Pemerintah melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 600 milyar untuk mendukung penjaminan kepada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia PP No. 67 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Penambahan PMN ke dalam Modal Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.³

Sehubungan dengan penambahan PMN tersebut, maka sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama MoU (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK, tanggal 9 Oktober 2007 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia melakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Kredit dengan perbankan pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat

³ *Ibid*

Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Bukopin Tbk. Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu sendiri merupakan penyaluran kredit produktif perbankan yang dilakukan secara komersial dan prudensial sesuai dengan prinsip perbankan, bagi UMKMK yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan perbankan atau feasible tetapi belum bankable. Dalam skim tersebut, plafond maksimal untuk setiap UMKM adalah sebesar Rp 500 juta, dengan bunga setinggi-tingginya sebesar 16%, dan coverage penjaminan sebesar 70% dari kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank. Atas penjaminan tersebut, Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia berhak mendapatkan IJP (Imbal Jasa Penjaminan) sebesar 1,5% per tahun dari kredit/pembiayaan yang dijamin, dimana IJP tersebut menjadi beban APBN.

Saat ini Perum Jamkrindo memiliki 11 kantor cabang dan 6 kantor anak cabang, yaitu kantor cabang Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Pontianak, Denpasar, Palembang, Samarinda dan Medan. Sedangkan kantor anak cabangnya yaitu di Palangkaraya, Mataram, Manado, Banjarmasin, Jayapura dan Kupang. Dan akan terus berkembang dengan membuka cabang dan anak cabang di berbagai wilayah lain di tanah air.

Mitra Kerja Perum Jamkrindo meliputi lebih dari 70 Mitra Perbankan/Lembaga Keuangan yang menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK melalui skim konvensional maupun syariah.

B. Struktur Organisasi Perum Jamkrindo Cabang Pekanbaru

1. Pengertian organisasi

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Pengorganisasian.

Seperti telah diuraikan sebelumnya tentang Manajemen, Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi.

3. Pengertian Struktur Organisasi.

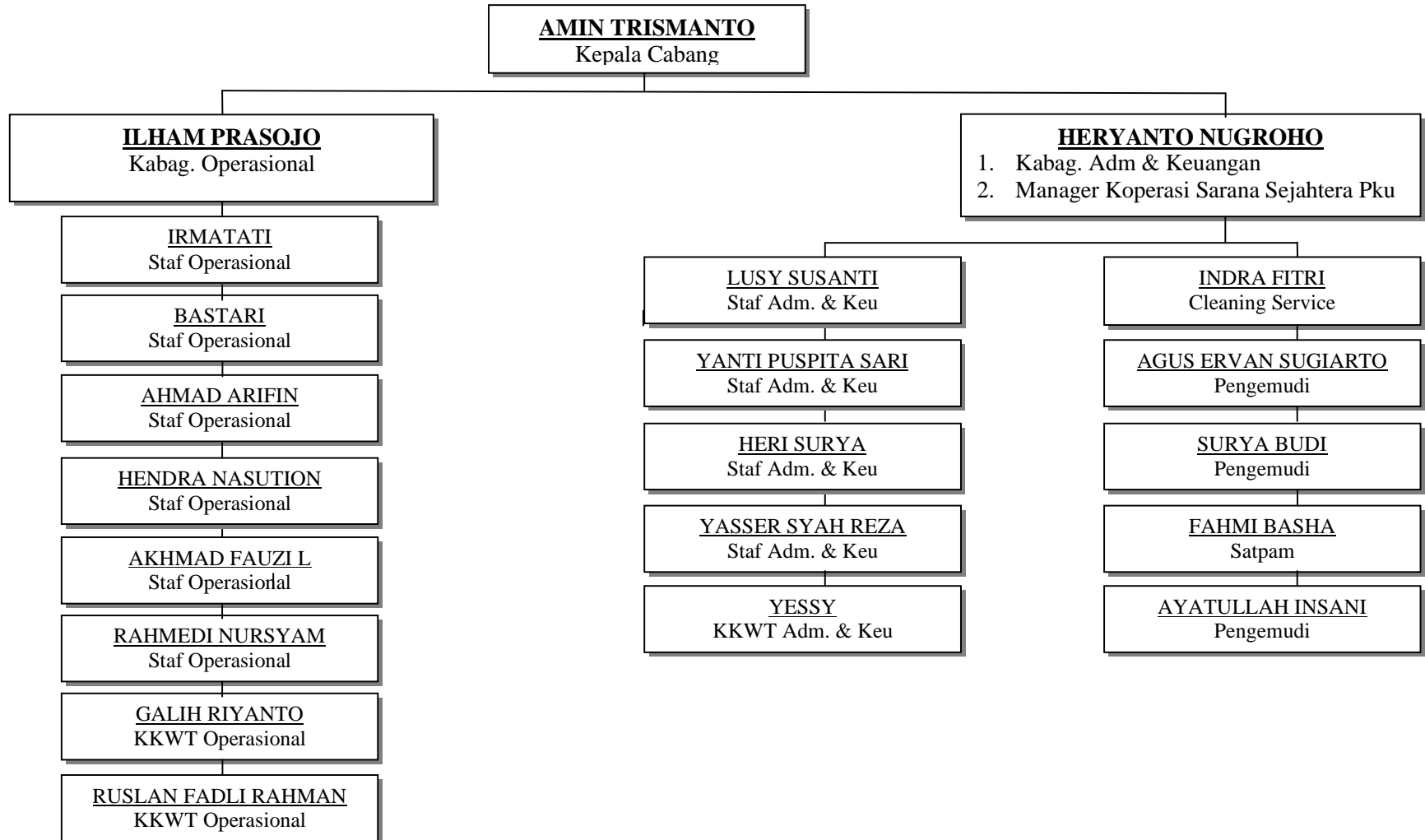
Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

4. Pengertian Bagan Organisasi

Struktur organisasi pada umumnya digambarkan dalam suatu bagan yang disebut bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur

organisasi yang formal, dimana dalam gambar tersebut ada garis-garis (instruksi dan koordinasi) yang menunjukkan kewenangan dan hubungan komunikasi formal, yang tersusun secara hierarkis.

STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA CABANG PEKANBARU



5. Fungsi dan Tugas ⁴

a. Kepala Kantor Cabang

- 1). Merencanakan, mengelola serta mengendalikan segala aktifitas kantor cabang sesuai kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.
- 2) Memaksimalkan tingkat pelayanan dan laba usaha
- 3) Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah dan kerjasama dengan relasi.

b. Kepala Bagian Operasional

Bertanggungjawab atas semua operasional pada perum jaminan kredit Indonesia cabang pekanbaru baik transaksi maupun kegiatan lain yang berkenaan dengan kerjasama dengan relasi dari lembaga keuangan bank dan non bank.

c. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

- 1) Bertanggungjawab atas fisik uang dan mengontrol semua transaksi yang terjadi di kantor.
- 2) Mengawasi kinerja pegawai sehingga terjadi tingkat efisiensi dan memperkecil resiko kegagalan kerja.

⁴ *Ibid*

- 3) Memproses klaim nasabah yang diterima dari bank-bank yang bekerjasama dengan Perum Jaminan Kredit Indonesia cabang Pekanbaru.
- 4) Berwewenang merekrut dan memberhentikan karyawan.

d. Staf Administrasi dan Keuangan

- 1) Menginput keuangan perusahaan dan mengalokasikannya.
- 2) Memproses klaim nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- 3) Memproses klaim nasabah eksisting (kredit multiguna, investasi dll.)
- 4) Mencatat semua proses transaksi baik dengan bank maupun non bank.
- 5) Mencatat rekening koran antara bagian operasional dan Adm. Keu.
- 6) Mengendalikan surat masuk dan surat keluar.

e. Staf Operasional

- 1) *Account Officer* (AO) Bank Pembangunan Daerah, Bank Pelaksana, serta non Bank baik KUR maupun non KUR.
- 2) Analisis kredit/pembiayaan.
- 3) Menerbitkan sertifikat penjaminan (SP) kredit/pembiayaan KUR atau non KUR, multiguna dan lain sebagainya.

- 4) Mencatat semua transaksi operasional dan dilaporkan kepada Direksi (Kantor Pusat).
- f. *Staf Support* (staf pendukung/pembantu)
- g. Pengemudi (khusus untuk mobil dinas kepala cabang dan kepala bagian)
- h. Kurir (mengantar surat langsung maupun lewat jasa pos atau paket kilat).
- i. *Cleaning Cervice* (CS) yaitu petugas kebersihan kantor sekaligus penjaga resepsionis.

C. Tujuan, Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

1. Tujuan Pendirian Perusahaan

Tujuan didirikannya Perusahaan Umum Jaminan Kredit adalah untuk melaksanakan program pemerintah di bidang pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan jalan melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit, memberikan bantuan konsultasi manajemen bagi usaha kecil.⁵

2. Visi Perusahaan

Adapun visi dari Perum Jamkrindo adalah menjadi perusahaan penjaminan yang kompetitif, terpercaya, sehat dan berkembang dalam

⁵ *Ibid*

meningkatkan peran usaha mikro, kecil menengah dan koperasi menuju terciptanya struktur perekonomian nasional yang seimbang dan mantap.⁶

3. Misi Perusahaan

Misi dari Perum Jamkrindo ialah sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan usaha jasa penjaminan, pinjaman bagi hasil, dan surety bond serta bantuan manajemen dan konsultasi bagi pengembangan bisnis umkm agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang utuh.
- b. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang sekaligus memupuk keuntungan guna memberikan pelayanan yang lebih luas kepada nasabah, mitra bisnisnya serta kemanfaatan bagi perusahaan.
- c. Proaktif terhadap segala perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait.

4. Budaya Perusahaan

Adapun budaya perusahaan yang harus dijiwai oleh seluruh jajaran perusahaan adalah :

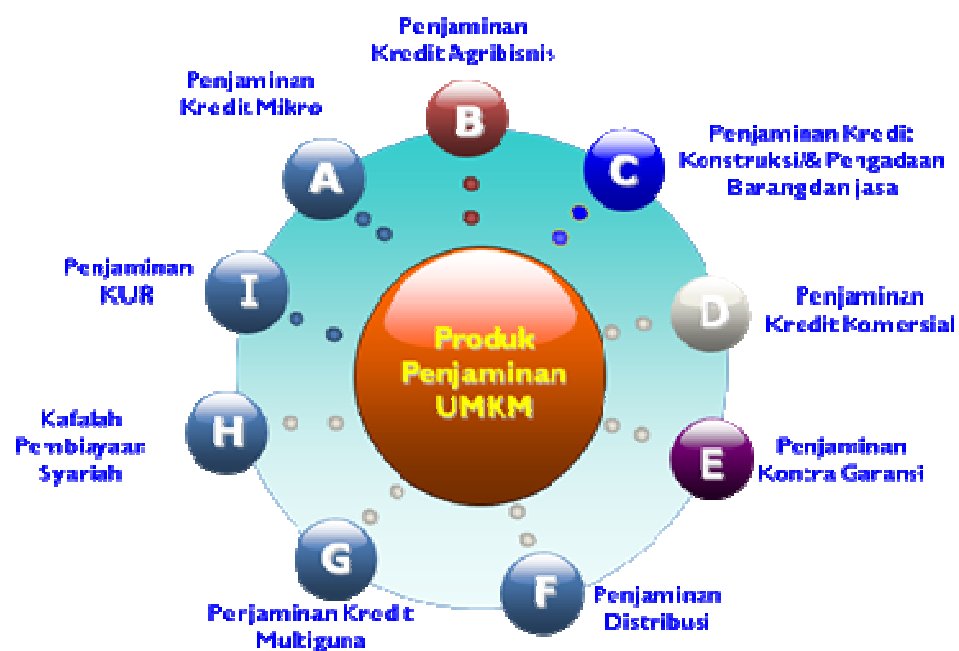
- a. Berorientasi pada kepuasan konsumen,
- b. Proaktif terhadap segala perubahan lingkungan usaha,
- c. Bekerja tekun, penuh rasa disiplin dengan mengutamakan kepentingan perusahaan.

⁶ *Ibid*

- d. Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan.

D. Produk Penjaminan Kredit

Produk penjaminan kredit yang ditawarkan adalah sebagai berikut:⁷



1. Penjaminan Kredit Mikro

Penjaminan kredit mikro adalah penjaminan atas kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro, kecil atau koperasi untuk keperluan Modal Kerja dan/atau Investasi di seluruh sektor ekonomi dengan plafond maksimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Penerima Jaminan atau

⁷ Ibid

sesuai kesepakatan tertulis antara Perum Jamkrindo (d/h Perum Sarana) dan Penerima Jaminan (Bank).

2. Penjaminan Kredit Agribisnis

Penjaminan kredit agribisnis adalah penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan atau badan usaha lainnya kepada koperasi untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan atau investasi pada sektor agribisnis, diantaranya pembangunan kebun kelapa sawit, jeruk, kakao dan sebagainya.

3. Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang / Jasa.

Penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang / jasa adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah dalam rangka pengadaan barang atau jasa dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pengguna barang/jasa.

4. Penjaminan Kredit Komersial (Umum)

Penjaminan kredit komersial (umum) adalah Penjaminan atas skim kredit komersial (Umum) yang disalurkan perbankan kepada UMKM. Plafond kredit untuk UMKM yang dapat dijamin tergantung dari ketentuan perkreditan bank yang bersangkutan dan sesuai kebutuhan UMKM berdasarkan kelayakan usaha.

5. Penjaminan Bank Garansi / Kontra Garansi

Penjaminan bank garansi / kontra garansi adalah pemberian jaminan sebagai kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank kepada Terjamin.

6. Penjaminan Distribusi

Penjaminan distribusi adalah penjaminan atas kredit untuk penyaluran barang dari Penerima Jaminan (produsen barang) kepada Terjamin yang mewajibkan Terjamin untuk melunasi hutangnya tersebut setelah jangka waktu tertentu.

7. Penjaminan Kredit Multiguna

Penjaminan kredit multiguna adalah penjaminan kredit yang disalurkan oleh perbankan untuk membiayai berbagai keperluan nasabah perorangan atau anggota koperasi pegawai/karyawan.

a. Penjaminan Kredit BPR

Yaitu penjaminan atas penyediaan uang dari Penerima Jaminan kepada Bank Perkreditan Rakyat untuk keperluan Modal Kerja dan/atau Investasi yang mewajibkan BPR untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bunga tertentu.

b. Penjaminan Pembiayaan Modal Ventura

Penjaminan yang diberikan atas penyediaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura kepada nasabah (Perusahaan Pasangan Usaha), yang tertuang di dalam perjanjian pembiayaan dalam bentuk

obligasi konversi atau pinjaman bagi hasil, yang dilakukan untuk tujuan pembiayaan investasi dan/atau modal kerja, dimana nasabah wajib melunasi kewajiban hutang, kupon dan denda atas pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

8. Kafalah Pembiayaan Syariah

Kafalah pembiayaan syariah adalah penjaminan bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah yang disalurkan oleh bank umum syariah maupun unit usaha syariah.⁸

Jenis-Jenis Produk Kafalah Syariah :

- a. Kafalah Pembiayaan Umum
- b. Kafalah Pembiayaan Multiguna
- c. Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
- d. Kafalah Pembiayaan Mikro
- e. Kafalah Pembiayaan kepada BPRS
- f. Kafalah Kontra Bank Garansi

9. Penjaminan KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Adalah penjaminan atas kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi usaha produktif untuk UMKMK, guna meningkatkan akses UMKMK pada sumber pembiayaan dalam rangka penanggulangan / pengentasan

⁸*Ibid*

kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Mitra kerja penjaminan KUR adalah : Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank BSM. Kredit / pembiayaan KUR yang disalurkan kepada UMKMK dimaksud adalah dengan pola konvensional maupun syariah.

a. Bantuan Konsultasi Manajemen

Bantuan konsultasi manajemen diberikan untuk membantu memperbaiki manajemen UMKMK agar mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Dengan bantuan manajemen ini diharapkan UMKMK mampu menjalankan usahanya secara profesional, yang pada akhirnya akan menjamin eksistensi UMKMK seperti pelaku ekonomi lainnya.

b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Sejak diterbitkannya SK Menteri BUMN nomor Kep-236/2003, program kemitraan yang sebelumnya bernama Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) BUMN kini diubah menjadi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang berguna membantu pengembangan usaha masyarakat sekitar. Yang membedakan dari kedua istilah tersebut adalah batasan calon mitra binaan, dimana untuk Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) diperuntukkan untuk masyarakat di sekitar lokasi BUMN yang bersangkutan. Sumber dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) adalah dari penyisihan laba Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia setiap tahun berjalan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT, PENJAMINAN KREDIT, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK)

A. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.¹

Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

2. Unsur Kredit

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), cetakan pertama, h. 101-102

² Prionggo Suseno, *UU Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan SK-DIR tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004), cetakan ke-3, h. 3

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dan yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.³

b. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan, dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani kedua pihak pula.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah

³ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), cetakan ke-2, h. 13

disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar angsurannya padahal ia mampu, dan resiko akibat bencana alam, kematian, PHK, merupakan resiko secara tidak disengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.⁴

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yaitu bunga bagi bank konvensional. Sedangkan untuk bank syariah memperoleh bagi hasil (*margin*).⁵

B. Penjaminan Kredit dan Strategi Pemasarannya

Penjaminan kredit adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada UMKMK yang mempunyai

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta : Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1999), cetakan ke-2, h. 43

⁵ Kasmir, *op.cit.*, h. 75-76

usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis pihak perbankan, khususnya pemenuhan agunan (*non bankable*). kegiatan pemberian penjaminan kepada pihak kreditur atas kredit yang disalurkan oleh kreditur kepada debitur Terjamin. Penjaminan kredit menitikberatkan pada pengambilalihan sementara risiko kegagalan UMKMK sebagai pihak terjamin dalam hal pelunasan pinjaman atau kredit yang diterima, sehingga kewajiban UMKMK kepada kreditur sebagai penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

Peran sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban UMKMK kepada kreditur atau penerima jaminan, dan selanjutnya pemenuhan kewajiban tersebut menjadi piutang subrogasi Perum Jaminan Kredit Indonesia yang akan ditagih kembali pembayarannya kepada UMKMK, baik secara bersama dengan pihak kreditur maupun secara sendiri oleh kreditur atau Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

Strategi Pemasaran Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo dilakukan melalui program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Intensifikasi ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan mitra (bank dan kreditur lainnya) yang saat ini sudah berjalan dengan lancar. Ekstensifikasi ditujukan untuk memperluas kerjasama dengan mitra yang baru. Diversifikasi ditujukan untuk menghasilkan produk penjaminan yang mampu diserap baik oleh UMKMK maupun oleh mitra kerja sehingga menghasilkan solusi saling menguntungkan.

C. Usaha Mikro

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.⁶

Usaha mikro ialah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini..

Ciri-ciri usaha mikro :

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;

⁶ M. Fuad, DKK, *op.cit.*, h. 73

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), cetakan ke-2, h. 57-58

6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro :

1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
2. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat;
3. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll.;
4. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
5. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

1. Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
2. Tidak sensitive terhadap suku bunga;
3. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter;
4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

C. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁷

Usaha kecil ialah usaha yang berdiri berdasarkan modal dan manajemen sendiri dengan investasi modal terbatas dan daerah operasinya lokal serta ukuran

⁷*Ibid*, h. 61

secara keseluruhan relatif kecil. Dengan manajemen sendiri dan memiliki keterbatasan modal usaha ini memiliki kebebasan luas untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan usaha itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain. Namun dengan keterbatasan yang ada sesuai dengan usaha yang berjalan tidak berarti perusahaan kecil hanya melayani pasar setempat. Bahkan seringkali dijumpai pemasaran perusahaan kecil bisa mencapai lingkup nasional.

Fakta menunjukkan bahwa wiraswastawan memulai aktifitasnya dalam bentuk perusahaan kecil sebelum akhirnya berkembang menjadi besar. Berbagai bidang usaha memberikan kesempatan usaha, tingkat perolehan keuntungan maupun tingkat resiko yang berbeda-beda. contohnya ialah usaha tani, peternakan, pasirwisata, jasa dan lain sebagainya. Perusahaan kecil memiliki kekuatan dan kelemahan antara lain:⁸

Kekuatan perusahaan kecil ialah kebebasan dalam bertindak mengacu pada fleksibilitas gerak perusahaan dan kecepatannya dalam mengantisipasi perubahan tuntutan pasar. Hal ini lebih dimungkinkan dalam perusahaan kecil karena ruang lingkup perusahaan relatif kecil sehingga penyesuaian terhadap adopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dapat dilaksanakan dengan cepat. Penyesuaian dengan kebutuhan setempat juga dapat berjalan dengan baik terutama karena dekatnya perusahaan dengan masyarakat setempat dalam kaitannya dengan tuntutan perubahan selera pelanggan.

⁸ *Ibid*, h. 62-63

Sedangkan kelemahan usaha kecil ialah dalam hal spesialisasi keahlian, modal, dan jaminan pekerjaan terhadap karyawannya. Pada umumnya dalam hal spesialisasi keahlian perusahaan tidak memiliki keahlian khusus untuk semua bidang manajemen kecuali melakukan bidang yang dikuasainya secara berlebihan dan mengabaikan bidang yang kurang dikuasainya dan akan ditemukan kekurangan di sana sini. Kemudian berkenaan dengan modal yang relatif kecil mungkin hanya cukup untuk penyelenggaraan kegiatan sehari-hari, namun tidak demikian untuk keperluan perluasan dan kemungkinan perolehan kredit pinjaman juga tidak semudah perusahaan besar. Lalu berkenaan dengan karyawan yang lebih memilih perusahaan besar jika dibandingkan dengan pendidikan yang tinggi dan tidak setimpal dengan gaji perusahaan kecil.

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).⁹

Ciri-ciri usaha kecil :

⁹ *Dokumen Perum Jamkrindo, loc.cit.*

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
5. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning* (rencana usaha).

Contoh usaha kecil :

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
2. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
4. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
5. Koperasi berskala kecil.

D. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹⁰

Ciri-ciri usaha menengah :

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;

¹⁰ Fuad, DKK. *op,cit.*, h 64-66

3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh usaha menengah :

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

1. Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
2. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;
3. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar propinsi;
4. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
5. Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan

Kriteria

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

E. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Bagi Masyarakat Indonesia, Koperasi sudah tidak asing lagi, karena kita sudah merasakan jasa Koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darat. Secara harfiah Koperasi yang berasal dari bahasa Inggris Cooperation terdiri dari dua suku kata : ¹¹

- a. *Co* yang berarti bersama
- b. *Operation* berarti bekerja

Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi.

Koperasi adalah Asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Asosiasi berbeda dengan kelompok, asosiasi terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, lazimnya yang menonjol adalah kepentingan ekonomi. Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi.

Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia) ialah Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau

¹¹ *Ibid.*, h. 63-65

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

Itulah beberapa pengertian mengenai Koperasi, yang sudah menjelaskan pengertian koperasi dari berbagai sisi. Namun jika hanya sebatas pengertian tidak akan cukup untuk lebih mengenal koperasi, maka akan dicoba menjelaskan selanjutnya mengenai hal hal apa saja yang ada di dalam manajemen koperasi.

Pengertian pokok tentang Koperasi :

- a. Merupakan perkumpulan orang orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
- b. Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.
- c. Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil.
- d. Pengawasan dilakukan oleh anggota.
- e. Mempunyai sifat saling tolong menolong.
- f. Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota.¹²

2. Prinsip Koperasi

¹² *Ibid.*, h. 65

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia.

- a. Keanggotaanya sukarela dan terbuka. Yang keanggotaanya bersifat sukarela terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan gender.
- b. Pengawasan oleh anggota secara Demokratis. Anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Laki laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara). Pada tingkatan lain koperasi juga dikelola secara demokratis.
- c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua tujuan seperti di bawah ini :
 - 1) Mengembangkan koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan.
 - 2) Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi.
 - 3) Mendukung kegiatan lainnya yang disepakati dalam rapat anggota.

3. Jenis Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan usaha atau kepentingan ekonomi anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenisnya adalah : ¹³

a. Koperasi Produsen.

Koperasi produsen beranggotakan orang-orang yang melakukan kegiatan produksi (produsen). Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara menekan biaya produksi serendah-rendahnya dan menjual produk dengan harga setinggi-tingginya. Untuk itu, pelayanan koperasi yang dapat digunakan oleh anggota adalah Pengadaan bahan baku dan Pemasaran produk anggotanya.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen beranggotakan orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat. Contoh :

1). Koperasi simpan pinjam

2). Koperasi serba usaha (konsumen)

¹³*Ibid.*, h 67-68

4. Kewajiban Dan Hak Anggota

Anggota koperasi memiliki peran ganda, sebagai pemilik sekaligus pengguna pelayanan koperasi. Sebagai pemilik, anggota berpartisipasi dalam memodali, mengambil keputusan, mengawasi, dan menanggung resiko. Sebagai pengguna, anggota berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan koperasi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan bila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Sedangkan hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh. Bila hak ini tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dapat menuntut. Tetapi bila hak tersebut tidak digunakan, maka tidak ada sanksi untuk itu.¹⁴

Anggota koperasi berkewajiban :

- a. Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- b. Menanda tangani perjanjian kontrak kebutuhan. Sehingga, anggota benar benar sebagi pasar tetap dan potensial bagi koperasi.
- c. Menjadi pelanggan tetap
- d. Memodali koperasi
- e. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan
- f. Menjaga rahasia perusahaan dan organisasi koperasi kepada pihak luar

¹⁴ *Ibid.*, h. 70

- g. Menanggung kerugian yang diderita koperasi, proporsional dengan modal yang disetor.

Anggota koperasi berhak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- b. Memilih pengurus dan pengawas
- c. Dipilih sebagai pengurus atau pengawas
- d. Meminta diadakan rapat anggota
- e. Mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak
- f. Memanfaatkan pelayanan koperasi dan mendapat pelayanan yang samadengan anggota lain,
- g. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi
- h. Menyetujui atau mengubah AD / ART serta ketetapan lainnya.

Struktur Organisasi Koperasi

- a. Rapat Anggota
- b. Pengawas
- c. Pengurus
- d. Manajer
- e. Komite

BAB IV

**PERAN PENJAMINAN KREDIT TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK) PADA PERUSAHAAN UMUM
JAMINAN KREDIT INDONESIA (PERUM JAMKRINDO) CABANG
PEKANBARU**

A. Peran Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Penjaminan Kredit adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada UMKMK yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama pada pemenuhan agunan atau disebut tidak Bankable. Penjaminan Kredit merupakan kerjasama antara tiga pihak, yaitu Perusahaan Penjamin Kredit (Perum Jamkrindo), Penerima Jaminan (Perbankan/Kreditur) dan Terjamin (nasabah UMKMK). Selanjutnya Penjamin Kredit (Perum Jamkrindo) akan mengambilalih sementara risiko pelunasan kredit Terjamin (nasabah UMKMK) kepada Penerima Jaminan (Perbankan / Kreditur) apabila pada waktu yang diperjanjikan terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan adanya Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo),

Perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.¹

Lembaga penjamin kredit merupakan salah satu infrastruktur sektor finansial yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses layanan perbankan bagi pengusaha golongan usaha mikro, kecil, dan menengah, meminimalisir risiko kredit, dan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan pada umumnya. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) didirikan untuk merealisasikan itu demi tercapainya perekonomian sosial khususnya UMKMK.

Penjaminan kredit UMKMK di banyak negara bertujuan memacu pertumbuhan sektor riil yang berdampak terbukanya penyediaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Jumlah UMKMK yang begitu banyak di Indonesia (sekitar 40 juta) dan menyebar di seluruh pelosok tanah air merupakan potensi pasar yang besar dari lembaga penjaminan kredit. Dengan jumlah potential clients yang banyak itu, lembaga penjaminan kredit seperti Perum Jamkrindo dapat secara leluasa memilih UMKMK yang *eligible* untuk ikut dalam program penjaminan.

Perum Jamkrindo cabang Pekanbaru merealisasikan produk-produknya ke berbagai bank di wilayah Riau, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau, baik bank konvensional maupun syariah, pelaksana KUR (Kredit Usaha Rakyat) maupun

¹ *Dokumen Perum Jamkrindo, loc.cit*

eksisting. Semuanya dijalani dengan ketentuan dan kesesuaian permintaan nasabah dari bank tersebut. Namun pada pelaksanaannya mayoritas nasabah lebih memilih KUR karena lebih efisien dan ekonomis.

Cara cepat dan mudah mengakses KUR adalah dengan memahami skema penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana KUR. Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKMK dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.²

Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha UMKMK dan Koperasi, Pemerintah akan mendorong peningkatan akses UMKMK dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Dengan demikian UMKMK dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan karena kekurangan agunan dapat diatasi.

² *Ibid*

KUR telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 5 Nopember 2007. Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong Perbankan menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Peluncuran tersebut merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

B. Mekanisme Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Setiap perusahaan pasti mengambil keuntungan dari mitra kerjanya. Sumber keuangan dalam rangka meningkatkan solvensi Perum Jamkrindo dapat berasal antara lain dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan penagihan piutang subrogasi serta bantuan dana donor atau pemerintah.³

³Hery Surya, (Staf Adm. Keu.), *Wawancara di Kantor Jamkrindo Cab. Pekanbaru* Tanggal 10 Juni 2010

IJP merupakan pendapatan perusahaan penjaminan yang dibayar oleh debitur bank yang dijaminnya. Besarnya IJP untuk periode 2010 ini ialah 0,0325 % per tahun atau tergantung dari nilai kredit, jangka waktu dan tingkat kegagalan dari suatu usaha.⁴

Piutang subrogasi merupakan hak tagih dari perusahaan penjaminan sebagai akibat dari telah dibayarnya klaim kredit bank. Piutang subrogasi timbul karena sifat pembayaran klaim dari Perum Jamkrindo kepada Bank dianggap sebagai talangan. Karena dianggap talangan maka dengan sendirinya perusahaan penjaminan tetap memiliki hak tagih kepada debitur Bank. Jika penagihan piutang subrogasi berjalan lancar, maka perusahaan penjaminan mendapatkan penggantian dana talangan yang telah dibayarkannya kepada bank. Keberhasilan perusahaan penjaminan mengumpulkan piutang subrogasi akan sangat tergantung pada keberhasilan bank dalam melakukan *credit recovery*⁵

Penjaminan kredit UMKMK didominasi dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan kepada setiap UMKMK dan dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi. Selain itu, Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKMK dan/atau tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola *executing* dan/atau pola *channeling*. Untuk mendukung pelaksanaan KUR, telah ditandatangani MoU pada tanggal 9 Oktober

⁴ *Dokumen Perum Jamkrindo, loc,cit*

⁵ *Ibid*

2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM antara 6 Departemen, 6 Perbankan dan 2 Perusahaan Penjamin.⁶

Pengajuan penjaminan kredit Perum Jamkrindo diawali dengan adanya pengajuan kredit oleh nasabah UMKMK kepada perbankan/kreditur, dan pengajuan penjaminan kredit oleh perbankan dan nasabah atau oleh perbankan untuk dan atas nama nasabah kepada Perum Jamkrindo. Jika Perum Jamkrindo menyetujui permohonan tersebut, maka Perum Jamkrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) untuk Bank Konvensional/ Sertifikat Kafalah (SK) untuk Bank Syariah.⁷

Penjaminan kredit yang dijamin oleh Perum Jamkrindo adalah sebesar 70% dari total permohonan yang diajukan (plafon kredit). Itu termasuk besar resiko yang jamin jika terjadi kemacetan, karena Perum Jamkrindo telah menjamin kreditnya, sedangkan sisa 30% lainnya ditanggung oleh Bank.⁸

Nasabah mengajukan kredit kepada bank pelaksana KUR yang kemudian diajukan seterusnya kepada Perum Jamkrindo untuk penjaminan kredit melalui proses sebagaimana prosedur bank terkait. Setelah melalui proses di atas bank mengajukan permohonan penjaminan kredit atas nama nasabah kepada Perum Jamkrindo dengan rincian yang terlampir pada surat permohonan akan diproses dengan langkah sebagai berikut :

⁶ *Ibid*

⁷ Bastari (Staf Operasional KUR), *Wawancara di Kantor Jamkrindo Cab. Pekanbaru* Tanggal 15 Juni 2010

⁸ *Ibid*

1. Perum Jamkrindo memproses permohonan mengacu pada peraturan dan undang-undang kerja sama yang berlaku dengan bank.
2. Perum Jamkrindo menerbitkan Sertifikat penjaminan (SP) atas nama nasabah terlampir dalam sertifikat tersebut.
3. Laporan penerbitan SP disampaikan kepada Perum Jamkrindo kantor pusat Jakarta dan diinput secara online.
4. Perum Jamkrindo menyampaikan SP kepada Bank pemohon penjaminan kredit.

a. Contoh Pengajuan KUR (Kredit Usaha Rakyat):

Saiful mempunyai usaha perdagangan yang kekurangan modal, ia mengetahui keberadaan program pemerintah yaitu (Kredit Usaha Rakyat) KUR, lalu ia mendatangi Bank terdekat untuk mengajukan KUR tersebut. Sesuai prosedur Bank, lalu permohonan saiful diproses dan diajukan kepada Perum Jamkrindo dengan data terlampir sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	No.Akad Kredit	Tgl. Akad	Nilai Kredit	Sektor Usaha	Jumlah Bulan
1	Saiful	Panam Pekanbaru	73/MK-KUR	23/07/10	Rp. 50 Jt	Perdagangan	36

Jenis Kredit	Nilai Pasaran Agunan	Tgl. Realisasi	Tgl. Jatuh Tempo
Modal Kerja	Rp. 40 Jt	25/07/2010	25/07/2013

b. Perhitungan Imbal Jasa Penjaminan(IJP)

Untuk menentukan besar Imbal Jasa Penjaminan (IJP) adalah :

$$\begin{aligned} \text{IJP} &= k \times p \times b \times t \\ &= \text{Rp. } 50.000.000 \times 70\% \times 0,0325 \times 3 \\ &= \text{Rp. } 35.000.000 \times 0,0975 \\ &= \text{Rp. } 3.412.500 \end{aligned}$$

Ket :

k = Jumlah Kredit

p = Nilai Penjaminan

b = Bunga Penjaminan

t = Jangka Waktu (tahun)

Perum Jamkrindo memproses permohonan di atas hingga selesai sesuai prosedur sebagaimana uraian sebelumnya. Perum Jamkrindo juga menyampaikan kepada bank pemohon untuk melaporkan perkembangan kredit nasabah UMKMK. Jika terjadi kredit macet, (meninggal dunia, musibah hingga kehilangan usaha, PHK) bank mengajukan permohonan klaim yang akan di proses oleh Perum Jamkrindo dan akan dibayarkan ganti ruginya.⁹

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

⁹ Ilham Prasajo (Kabag. Operasional), *Wawancara di Kantor Jamkrindo Cab. Pekanbaru*, Tanggal 17 Juni 2010

Berjalannya suatu usaha karena telah melalui banyak rintangan dan mampu menanganinya dengan manajemen tertentu hingga membuahkan hasil yang membanggakan. Tidak terlepas dari itu, sebagai BUMN perum jamkrindo Cabang Pekanbaru menjalani usaha menurut peraturan perundang-undangan yaitu PP No. 41 Tahun 2008 tentang kegiatan dan pengembangan usaha Pasal 8 Ayat a. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan ini di antaranya : ¹⁰

1. Sesuai dengan mekanisme penjaminan kredit, hal yang paling penting ialah adanya kesepahaman (MoU) dalam perjanjian kerjasama dan peraturan-peraturan dari pemerintah. Jika permohonan tidak sesuai dengan peraturan tersebut maka perum jamkrindo akan meluruskan kembali dengan menjelaskan kembali peraturan yang sudah ada hingga di setuju oleh bank.
2. Para pengusaha UMKMK kerap mengeluhkan sulitnya mendapatkan modal untuk kelangsungannya dan sulit menembus lembaga keuangan karena belum terbiasa untuk mengakses keuangan perbankan. Diharapkan kegiatan ini bisa menjembatani kedua belah pihak antara penjamin dan penerima jaminan.
3. Jika penjaminan kredit telah terealisasikan oleh ketiga pihak, perkembangan kredit oleh UMKMK masih belum efektif karena nasabah masih lalai dalam membayar angsuran.
4. Kelalaian nasabah UMKMK dalam menyelesaikan administrasi klaim macet. Seperti berkas-berkas dan hal lain yang di butuhkan Perum Jamkrindo.

¹⁰ *Dokumen Perum Jamkrindo, loc.cit*

5. Krisis kepercayaan bank terhadap perusahaan penjaminan. Krisis kepercayaan ini bermula dari ketidakmampuan perusahaan penjaminan menyelesaikan pembayaran klaim kepada bank terutama yang berkaitan dengan penyelesaian kredit program yang kebanyakan macet. Krisis kepercayaan juga dipicu oleh rumitnya birokrasi dalam penyelesaian klaim, tingginya fee penjaminan, serta waktu penyelesaian klaim yang dianggap terlalu lama. Sehingga ungkapan "*Fee is Obligatory but claim is optional*" suatu sindiran yang tepat untuk perusahaan penjaminan di negara kita.
6. Kredibilitas perusahaan penjaminan sangat tergantung pada tingkat solvensi yang dimilikinya. Tingkat solvensi perusahaan penjaminan merupakan kesanggupan untuk melunasi hutangnya dari para peminjam jika terjadi kegagalan pembayaran kredit. Tingkat solvensi berkaitan dengan seberapa besar equity dalam bentuk likuid dapat digunakan dalam menalangi kegagalan atas kredit macet yang dijaminnya. Makin baik tingkat solvensi suatu perusahaan penjaminan makin kredibel di mata bank. Makin buruk tingkat solvensi perusahaan penjaminan, makin tidak kredibel di mata bank.
7. Masih tingginya tingkat suku bunga KUR yang dipatok 14 persen per tahun menjadi salah satu hambatan pertumbuhan koperasi dan UMKMK di Tanah Air. Untuk itu, bunga KUR seharusnya bisa diturunkan lagi. "Selisih (*spread*) yang terlampau jauh dari suku bunga acuan hingga mencapai tujuh persen cenderung menjadi indikasi yang tidak sehat.
8. Di dalam banyak kasus, bank mengalami kesulitan dalam menagih piutang. Seringkali pengumpulannya difasiltasi dengan mendepositokan sejumlah

dana tertentu dengan pihak yang meminjamkan, disini berlawanan dengan dimana penjaminan dapat dikumpulkan. Kasus semacam ini biasa terjadi pada penjamin swasta, yang memiliki uang tunai deposito dalam jumlah besar.

9. Banyak penjaminan dipicu oleh reklasifikasi bank-bank dari pinjaman yang terkait telah jatuh tempo sesuai dengan standar supervisi. Biasanya suatu tingkat upaya pengumpulan harus ditunjukkan dan beberapa skim program penjaminan meminta dilakukannya auditing untuk setiap klaim (tuntutan) atau beberapa contoh dari suatu klaim. Yang terjadi disebutkan terakhir itu biasanya merupakan kasus di dalam program yang menjamin secara otomatis seluruh kategori klaim. Secara ekstrem skim penjamin menuntut dilakukan eksekusi putusan pengadilan atau keputusan pengadilan yang menetapkan kebangkrutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Penjaminan Kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sangat besar demi terciptanya perkembangan sektor riil, karena bagaimanapun usaha yang produktif harus didukung dengan modal yang cukup dari Perbankan.
2. Realisasi penjaminan kredit bagi UMKMK pada Perum jamkrindo cabang Pekanbaru mengacu pada peraturan dan undang-undang kerja sama atau kesepakatan (MoU) yang berlaku dengan Bank. Nasabah yang ingin melakukan penjaminan kredit dapat mengajukan kepada bank yang bekerja sama dengan perum jamkrindo. melalui mekanisme tertentu dan berpatokan pada perjanjian kerjasama yang berlaku.
3. Faktor yang sangat mempengaruhi penjaminan kredit ialah ketentuan-ketentuan pemerintah dalam pelaksanaan kredit UMKMK yang berkaitan dengan suku bunga, jangka waktu, dan lainnya yang direalisasikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

B. Saran

Sebelum penulis mengakhiri, penulis menyampaikan beberapa hal sebagai saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas terutama china, mau tidak mau UMKMK harus berperan demi perkembangan perekonomiannya. Meskipun banyak hal yang harus dilalui untuk mendapatkan *equity* atau modal usaha, namun bank dan lembaga penjamin kredit seperti Perum Jamkrindo bisa memberikan solusi yang memadai. Karena Perum Jamkrindo merupakan BUMN yang didirikan untuk mengayomi masyarakat khususnya UMKMK.

Penulis juga tidak lupa mengungkapkan bahwa hal ini sangat bermanfaat bagi penulis dan menjadi bahan masukan terutama bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cetakan ke-2

Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), cetakan pertama

Kasmir, SE, MM, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2004), cetakan ke-4

M. Fuad, DKK, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), cetakan ke-2

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), cetakan ke-5

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta : Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 1999) cetakan pertama

Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003) cetakan ke-2

Prionggo Suseno, *UU Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan SK-DIR tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004) cetakan ke-4

Dokumen Perum Jamkrindo Tahun 2009